

IMPLEMENTASI PROGRAM SATU MILIAR SATU DESA KABUPATEN BOGOR STUDI KASUS DI DESA MEGAMENDUNG

IMPLEMENTATION OF THE ONE BILLION ONE VILLAGE PROGRAMME IN BOGOR DISTRICT CASE STUDY IN MEGAMENDUNG VILLAGE

M. Rifa'i Eka Pratama¹, Muhamad Husein Maruapey²

¹Magister Administrasi Publik, Universitas Djuanda, rifai.eka@unida.ac.id

²Magister Administrasi Publik, Universitas Djuanda, m.maruapey@unida.ac.id

ABSTRACT

Villages are an important element in the Unitary State of the Republic of Indonesia because the existence of villages has existed since ancient times, even before Indonesian independence. Villages themselves have the right to regional autonomy where villages can develop and improve their own villages with policies from the local government. The SAMISADE program is to improve infrastructure in villages in Bogor Regency, including Megamendung Village, which is a village with a lot of tourism but there are still many access roads that are in a damaged condition. This research was conducted to determine the success of implementing the One Billion One Village (SAMISADE) program in Megamendung Village, Megamendung District, Bogor Regency in an effort to improve infrastructure, especially road infrastructure. The method used is a descriptive qualitative method using George C. Edward III's theory with four dimensions, namely Communication, Resources, Disposition and Bureaucratic Structure. The successful implementation of the SAMISADE program in Megamendung Village has been good, which can be seen from the results of research with resource persons, supporting documents and the results of work and reporting on the implementation of SAMISADE in Megemendung Village.

Key words: Implementation; Public policy; SAMISADE.

ABSTRAK

Desa merupakan elemen penting di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia karena eksistensi desa sudah ada sejak dahulu bahkan pra kemerdekaan Indonesia. Desa sendiri memiliki hak otonomi daerah dimana desa bisa mengembangkan dan meningkatkan desanya sendiri dengan kebijakan dari pemerintahan setempat. Program SAMISADE ini untuk peningkatan infrastruktur di desa yang ada di Kabupaten Bogor termasuk Desa Megamendung yang dimana merupakan desa dengan memiliki banyak wisata akan tetapi masih banyak akses jalan yang kondisinya rusak. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui keberhasilan implementasi program Satu Miliar Satu Desa (SAMISADE) di Desa Megamendung Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor dalam upaya peningkatan infrastruktur khususnya infrastruktur jalan. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan teori George C. Edward III dengan empat dimensi yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Keberhasilan Implementasi program SAMISADE di Desa Megamendung sudah baik, dapat dilihat dari hasil penelitian dengan narasumber, dokumen-dokumen pendukung dan hasil dari pengerjaan serta pelaporan pelaksanaan SAMISADE di Desa Megemendung.

Kata kunci: *Implementasi, Kebijakan Publik, SAMISADE.*

PENDAHULUAN

Desa ialah elemen yang penting di Indonesia sedari dahulu. Adanya Desa sudah ada sebelum NKRI merdeka di tanggal 17 Agustus 1945. Desa di waktu

dulu adalah kumpulan yang merupakan pemerintahan yang dapat dikatakan memang asli bangsa Indonesia dimana keberadaannya telah diakui eksis sebelum Indonesia dikatakan merdeka.

Data mengatakan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia merupakan wilayah pedesaan. Desa sendiri mempunyai kekhususan daripada daerah kelurahan atau daerah lainnya, karena desa diselenggarakan oleh pemerintahan yang berotonomi asli bahkan desa memiliki hak untuk memilih sendiri pemimpinnya dan membuat sendiri peraturan yang nantinya menjadi Peraturan Desa, Desa sangat unik jika kita bandingkan kembali dengan kelurahan yang dimana kelurahan memiliki batas-batas tertentu, akan tetapi desa sepenuh wilayah yang otonom.

Pada hakikatnya untuk meningkatkan pembangunan sebuah negara termasuk Indonesia, itu bukan hanya menjadi pemikiran dan tanggung jawab pemerintah pusat saja, akan tetapi itu menjadi tanggung jawab keseluruhan masyarakat termasuk Pemerintah Desa. Pembangunan sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu usaha dalam meningkatkan pertumbuhan yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa.

Begitu dengan Kabupaten Bogor memiliki hak otonomi daerah. Dan saat ini Kabupaten Bogor merupakan Kabupaten yang cukup berkembang, dikutip dari portal Antara News yang berjudul "Indeks Desa Membangun Kabupaten Bogor kini berstatus maju" pada tanggal 15 Januari 2022 bahwa Kabupaten Bogor di tahun 2022 tidak memiliki desa dengan status desa tertinggal dimana pada tahun 2022 Kabupaten Bogor memiliki 48 desa mandiri, 188 desa maju, 180 desa berkembang dan nihil desa tertinggal yang dimana data itu dapat menunjukkan bahwa Kabupaten Bogor terus berkembang dan cukup maju. Dan jika mengenai perkembangan perekonomian di Kabupaten Bogor khususnya di kawasan Puncak yang sangat terkenal dengan destinasi wisatanya yang banyak menarik para wisatawan tentu pariwisata menjadi ujung tombak dalam perputaran ekonomi, termasuk Desa Megamendung yang menjadi lokus dalam penelitian

dimana Desa Megamendung terletak di Kawasan Puncak serta banyak memiliki destinasi wisata, villa-villa dan hotel-hotel yang bagus untuk berwisata sehingga dapat meningkatkan perekonomian di daerah tersebut. Akan tetapi itu saja belum cukup, butuh banyak dana untuk meningkatkan daerah tersebut khususnya dalam hal infrastruktur. Oleh karena itu Kabupaten Bogor sadar akan butuhnya sokongan dana bagi setiap desa untuk mengembangkan daerahnya khususnya dalam hal infrastruktur, kemudian program tersebut diberi nama dengan program Satu Miliar Satu Desa (SAMISADE) yang pada tahun 2021 adalah SAMISADE pertama dan pada tahun 2023 adalah SAMISADE yang ketiga.

SAMISADE merupakan program yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor yang dimana Pemerintah Kabupaten Bogor mengalokasikan dana kepada setiap desa sebesar maksimal 1 miliar digunakan untuk pembangunan desa tersebut terutama untuk infrastruktur jalan, akan tetapi boleh untuk hal lainnya seperti pembangunan menara seluler di kawasan blank spot, akan tetapi kondisi infrastruktur jalan harus dalam keadaan baik terlebih dahulu baru dapat dianggarkan ke selain jalan dan program SAMISADE ini berpedoman pada yang mulanya Peraturan Bupati Bogor Nomor 83 diubah menjadi Peraturan Bupati Bogor Nomor 100 Tahun 2021 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa.

Program SAMISADE ini sangat dibutuhkan karena masih ada beberapa desa yang sulit dijangkau karena rute jalan yang rusak atau pun sulit diakses, oleh karena itu program ini menjawab masalah-masalah tersebut sehingga bisa dikatakan bahwa di Kabupaten Bogor itu bukan membangun desa akan tetapi desa membangun yang dimana desa tersebut yang membangun dan memajukan desanya sendiri. Desa Megamendung masuk dalam wilayah Kecamatan

Megamendung. Desa di Kecamatan Megamendung berjumlah 12 Desa dan semua mendapatkan bantuan Program SAMISADE termasuk Desa Megamendung sudah mendapatkan dan menjalankan program SAMISADE. Desa Megamendung banyak memiliki destinasi wisata seperti Curug Cibulao dan lainnya akan tetapi jalan yang harus dilalui sangat tidak layak, sebelum dilaksanakannya program SAMISADE banyak jalan terutama akses ke kawasan wisata sangat memprihatinkan yang dimana jalan berbatu dan sangat rusak sehingga sulit untuk diakses. Akan tetapi setelah dilaksanakannya program SAMISADE di jalan tersebut, saat ini jalan sudah nyaman untuk dilalui karena jalan sudah dibeton atau dicor. Sehingga diharapkan pembangunan jalan tersebut menjadi stimulan untuk pengembangan Desa Megamendung sehingga menjadikan Desa Megamendung lebih cepat dalam hal pembangunan dan diharapkan dengan pembangunan jalan di daerah Desa Megamendung terutama daerah yang pelosok dapat meningkatkan perekonomian Desa Megamendung. Penelitian ini dilaksanakan pada program SAMISADE Desa Megamendung dan pada program SAMISADE ini, desa Megamendung mendapatkan bantuan dana maksimal yaitu 1 miliar dikarenakan dalam proposal diajukan 1 miliar dan proposal tersebut lolos verifikasi.

Hasil observasi awal dalam pelaksanaan program SAMISADE di Desa Megamendung terdapat beberapa hal yang menjadi kendala atau masalah di lapangan dalam pelaksanaan program SAMISADE diantaranya:

- 1) Banyak masyarakat yang kurang mengetahui mengenai program SAMISADE khususnya di daerah program SAMISADE dilaksanakan.
- 2) Masalah sumber daya dimana ada sebagian warga yang tidak setuju mengenai pembagian jumlah warga yang dikaryakan atau dipekerjakan dalam program SAMISADE.

- 3) Masyarakat yang kurang mengetahui SOP melakukan pengaduan atau keluhan dalam pelaksanaan program SAMISADE.
- 4) Kurangnya dana karena maksimal yang didapatkan desa hanya 1 miliar dan belum dipotong pajak akan tetapi banyak yang sudah harus diperbaiki.

Merujuk pada paparan sudah disusun peneliti maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Implementasi Program Satu Miliar Satu Desa Kabupaten Bogor Studi Kasus di Desa Megamendung". state of the art dari topik penelitiannya sehingga gambaran utama penelitiannya menjadi jelas bagi para pembaca. Namun, acuan pustaka dalam pendahuluan harus dibatasi karena bukan merupakan pembahasan awal.

METODE PENELITIAN

Fokus penelitian ini mengacu pada implementasi program SAMISADE di Desa Megamendung Kecamatan Megamendung dengan Metode pengkajian yang dipakai untuk penelitian artikel ini ialah pendekatan kualitatif. Dalam Moleong (2016) menyatakan bahwasanya penelitian kualitatif sebenarnya bertujuan untuk mengertikan fenomena mengenai apa-apa yang dialami oleh subjek penelitian artikel ini seperti halnya persepsi, perilaku, motivasi, tindakan dan sebagainya secara menyeluruh dan dengan tata cara deskripsi yang berbentuk kata-kata dan bahasa pada suatu hal khusus yang sifatnya alamiah serta dengan cara memanfaatkan beberapa metode alamiah. Pendekatan penelitian kualitatif dilakukan karena untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai implementasi program Satu Miliar Satu Desa di Desa Megamendung Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini tentunya akan menjawab permasalahan yang memang menjadi fokus dalam pelaksanaannya dan dalam penelitian ini, penulis hendak

menjawab masalah mengenai bagaimana Implementasi program Satu Miliar Satu Desa (SAMISADE) di Desa Megamendung dan faktor-faktor apa yang menjadi kendala yang menghambat mengimplementasikan mengetahui berbagai macam upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan atau kendala tersebut serta tindakan sosial yang ada dalam implementasi program SAMISADE di Desa Megamendung. Dan oleh sebab itu peneliti akan menjelaskan hasil dari analisis data yang dikumpulkan terlebih dahulu lalu peneliti akan memaparkan pembahasan dalam penelitian yang dilakukan penulis.

Pengimplementasian kebijakan publik seperti yang dipaparkan oleh Edward III seberapa besar pun efektifnya suatu kebijakan publik yang dilakukan, kalau tidak dibuat perencanaan dan dipersiapkan secara sungguh-sungguh untuk implementasinya, maka tujuan kebijakan tidak akan dapat tercapai. Implementasi SAMISADE di Desa Megamendung dengan menggunakan Teori Implementasi menurut Edward III dapat dijelaskan sebagai berikut dan ada beberapa hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaannya:

1) KOMUNIKASI

Faktor komunikasi sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan termasuk dalam mengimplementasikan program SAMISADE di Desa Megamendung, Kecamatan Megamendung. Dengan faktor komunikasi yang baik dan sesuai dengan tujuan akan memberikan dampak yang baik pula untuk berjalannya suatu kebijakan yang dilaksanakan. Penyampaian informasi dapat dikatakan cukup baik karena sudah dilaksanakan sosialisasi kepada Ketua RT di Desa Megamendung dan sudah memasang baliho program SAMISADE di kawasan pembangunan, akan tetapi masih ada Desa ialah elemen yang penting di Indonesia sedari dahulu. Adanya Desa sudah ada sebelum NKRI merdeka di tanggal 17 Agustus 1945. Desa di waktu dulu adalah kumpulan

yang merupakan pemerintahan yang dapat dikatakan memang asli bangsa Indonesia dimana keberadaannya telah diakui eksis sebelum Indonesia dikatakan merdeka. Data mengatakan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia merupakan wilayah pedesaan. Desa sendiri mempunyai kendala dimana tidak semua masyarakat Desas Megamendung tahu akan program SAMISADE karena informasinya sebatas kepada Ketua RT, baiknya sosialisasi dilakukan langsung kepada masyarakat, karena dikhawatirkan Ketua RT dari masing-masing daerah tidak mengsosialisasikan program SAMISADE lagi kepada masyarakat dan bisa juga memasang baliho tidak hanya di daerah pembangunan akan tetapi di seluruh wilayah strategis di daerah Desa Megamendung sehingga informasi dapat menyeluruh.

Untuk kejelasan informasi dapat dikatakan cukup baik karena sebagian warga tahu secara detail dan jelas dan sebagian tidak tahu, karena sosialisasi dibatasi sampai ke Ketua RT saja oleh Pemerintah Desa Megamendung dan Ketua RT tidak mengsosialisasikan kembali program SAMISADE kepada warga dan bisa dengan memasang baliho program SAMISADE yang besar lengkap dengan data rincinya sehingga warga dapat tahu secara jelas dan rinci bagaimana program SAMISADE di Desa Megamendung.

Konsistensi informasi yang disampaikan cukup baik karena dari awal perencanaan sampai selesai tidak ada perubahan khususnya dalam segi informasi, hanya saja informasi yang tidak menyeluruh dikarenakan butuh sosialisasi lebih luas lagi dikarenakan wilayah Desa Megamendung yang luas. Dalam hal ini untuk dimensi komunikasi dapat dikatakan cukup baik karena dalam pelaksanaannya dapat dikategorikan baik walaupun dihadapkan pada beberapa kendala sehingga butuh peningkatan lagi dalam komunikasi sehingga informasi mengenai implementasi SAMISADE di Desa

Megamendung dapat mencakup warga keseluruhan.

2). Sumber Daya

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan atau program sumber daya merupakan sebuah faktor yang bisa juga di sebut faktor utama sebagai penggerak maupun pendukung jalannya kebijakan sehingga kebijakan tersebut dapat di jalankan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Dalam teori proses keberhasilan kebijakan Edward III di jelaskan bahwa di dalam dimensi sumber daya memiliki empat indikator yaitu staf yang cukup (jumlah dan mutu), anggaran yang cukup, kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas atau tanggungjawab dan fasilitas yang di butuhkan dalam pelaksanaan.

a. Indikator Staf yang Cukup (Jumlah dan Mutu)

Indikator staf yang cukup dalam pelaksanaan program SAMISADE sudah baik. Hal tersebut didukung karena dalam proses pelaksanaan program melibatkan pemerintah Desa Megamendung dalam hal ini serta didampingi pemerintahan yang berada di Kecamatan Megamendung yang satu sama lain saling bersinergis serta banyak masyarakat yang dikaryakan atau diikut sertakan dalam pembangunan sehingga jumlah pelaksana dapat dikatakan cukup serta memiliki kualitas kompetensi yang baik serta sesuai dalam menjalankan program SAMISADE. Berdasarkan wawancara dengan pemerintah Desa Megamendung dan masyarakat bahwa ada beberapa kendala dalam pemilihan masyarakat yang diikut sertakan dalam pelaksanaan SAMISADE yang dimana Ketua RT di Desa Megamendung mengeluh perihal warganya yang dikaryakan hanya beberapa, tidak sebanding dengan warga yang ada di kampung lain, sehingga masalah tersebut menjadi sebuah kendala yang padahal di awal bisa diantisipasi oleh pemerintah Desa Megamendung baik dengan diberi pengertian maupun dengan menambah

kuota warga daerah yang dianggap terlalu sedikit yang dikaryakan.

b. Sumberdaya Anggaran

Terkait anggaran dalam implementasi program SAMISADE di Desa Megamendung dapat dikatakan cukup atau sedang. Hal tersebut didukung karena dalam pelaksanaan di lapangan proses tahapan pengajuan diawali dengan mengajukan proposal permohonan dari desa. Dimana Desa Megamendung mendapatkan bantuan dengan jumlah nominal maksimal yaitu 1 miliar yang Dimana semuanya dilimpahkan pada pembangunan jalan. Berdasarkan pada wawancara dengan masyarakat dan pihak Pemerintah Desa Megamendung dengan jalan rusak yang banyak dan 1 miliar harus dipotong pajak maka anggaran dapat dikatakan cukup sehingga tidak ada anggaran lebih untuk jalan lain atau infrastruktur lain bahkan ada pemotongan panjang jalan yang rencana awal 1.750 meter menjadi 1.350 meter karena menyesuaikan dengan anggaran yang didapat serta dengan jumlah dana bantuan yang di dapat dalam program SAMISADE oleh Desa Megamendung digunakan semua dan habis dalam pelaksanaan program SAMISADE maka dapat dinyatakan pelaksanaan program berjalan dengan efektif. Adapun saran dalam hal anggaran agar pemerintah Desa Megamendung menyusun perencanaan anggaran setelah dipotong pajak.

c. Indikator kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas atau tanggung jawab

Implementasi program SAMISADE di Desa Megamendung Kecamatan Megamendung dalam hal kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas atau tanggungjawab sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut didukung karena dengan di berikannya kewenangan Kepala Desa Megamendung untuk menjadi pelaksana bantuan program SAMISADE yang tentunya menjadi sebuah kewajiban yang di sertai

dengan kewenangan untuk dapat mengatur jalannya kebijakan bantuan program SAMISADE tersebut dengan baik.

d. Indikator Fasilitas

Fasilitas dibutuhkan dalam pelaksanaan sudah cukup baik. Berdasarkan keterangan dari masyarakat dan pemerintah Desa Megamendung bahwa dalam fasilitas alat berat seperti mobil molen besar dan lainnya untuk pembangunan jalan termasuk pengecoran tidak masuk dalam wilayah jalan yang dibangun karena keadaan alam yang tidak mendukung dimana tempat pembangunan tersebut berada dalam perbukitan dan ruas jalan yang kecil serta terjal akan tetapi pada pelaksanaannya menggunakan mobil-mobil yang sedikit kecil dan alat-alat yang kecil juga untuk pengecorannya sehingga banyak pembangunan dilakukan dengan manual dikarenakan kondisi alam tersebut yang menyebabkan berkategori cukup baik dalam hal fasilitas.

3) Disposisi

Disposisi masuk pada alat ukur untuk memperhitungkan keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik termasuk dalam implementasi program SAMISADE. Dimana ketika pelaksana atau implementator kebijakan sudah setuju dengan sebagian atau keseluruhan dari isi kebijakan publiknya, mereka pastinya akan melakukan dengan bahagia akan tetapi jika pemahaman mereka berbeda dengan yang membuat kebijakan maka dari itu proses pengaplikasiannya akan mengalami permasalahan.

a. Indikator komitmen sikap pelaksana terhadap program (Pemimpin)

Komitmen sikap pelaksana (pemimpin) terhadap program sehingga sudah dapat dikatakan baik. Hal tersebut didukung karena sikap yang konsisten sesuai dengan aturan dan perencanaan menjadi patokan dan ukuran pemimpin kebijakan dalam menjalankan kebijakan.

b. Indikator komitmen sikap pelaksana terhadap program (Pelaksana Lapangan)

Komitmen sikap pelaksana terhadap program dapat dikatakan baik. Hal tersebut didukung karena tanggungjawab serta sikap pelaksana lapang yang komitmen terlihat dari usaha yang dimulai dari perencanaan, penyusunan proposal, pelaksanaan sampai dengan laporan dapat dilaksanakan hingga tuntas yang dimana berdasarkan wawancara dengan pemerintah Desa Megamendung, laporan pelaksanaan program SAMISADE Desa Megamendung dapat dikatakan lolos dengan sangat baik dan terhindar dari kendala.

c. Indikator Pemimpin yang tegas

Indikator pemimpin yang tegas dalam implementasi program SAMISADE di Desa Megamendung bisa dikatakan baik hal tersebut didukung karena sikap tegas dan tanpa pandang bulu di tunjukan seluruh pelaksana kebijakan dalam pelaksanaan program SAMISADE.

4) Struktur Birokrasi

Dimensi lainnya yaitu struktur birokrasi yang tentunya mempunyai pengaruh atau dampak yang signifikan dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Faktor struktur organisasi ini mencakup dua hal yaitu yang pertama mekanisme dan struktur birokrasi. Faktor pertama adalah mekanisme dimana dalam implementasi kebijakan publik biasanya sudah dibuatkan terlebih dahulu Standard Operation Procedure (SOP)nya. SOP tentu dapat menjadi pedoman untuk setiap pelaksana kebijakan dalam hal bertindak supaya dalam pengimplementasiannya kebijakan tersebut tidak melenceng dari tujuan yang telah ditetapkan dan sasaran kebijakan tersebut ikut serta dalam pelaksanaan program SAMISADE. faktor kedua ialah struktur birokrasi atau tata aliran birokrasi, struktur birokrasi yang dianggap terlalu panjang dan berbelit-belit akan lebih berdampak melemahkan pengawasan

dan tentu akan menyebabkan prosedur birokrasi seakan tidak rapi dan terlalu kompleks yang pada tahap selanjutnya akan berdampak pada aktifitas kelompok menjadi tidak dinamis.

a. Indikator Standart Operational Procedur (SOP)

SOP untuk pelaksanaan SAMISADE di Desa Megamendung sudah baik. Dikarenakan hasil wawancara pihak pemerintah Desa Megamendung dan masyarakat Desa Megamendung menyatakan penjelasan tahapan-tahapan, alur-alur serta prosedur-prosedur program SAMISADE jelas dan sudah disosialisasikan oleh pihak Kecamatan bahkan sampai didampingi dalam penyusunan proposal sampai laporan serta untuk masyarakat sudah disosialisasikan oleh pihak pemerintah Kecamatan Megamendung melalui rapat RT dan RW Desa Megamendung.

b. Indikator Standart Operational Procedur (SOP) Pengaduan

Dalam hal Standart Operational Procedur (SOP) Pengaduan sudah cukup Baik. Hal tersebut berdasarkan wawancara pihak pemerintah Desa Megamendung menyatakan penjelasan mengenai SOP program SAMISADE yang lengkap dan sebagian warga lokus penelitian ada yang memahami SOP mengenai pengaduan jika ada hal yang dikeluhkan atau tidak disetujui.

c. Indikator Mengatur Tata Aliran Kerja Birokrasi

Mengatur tata aliran kerja birokrasi sudah baik. Hal tersebut didukung karena Pengaturan tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan aturan sehingga pada saat pelaksanaan kebijakan berjalan dengan baik dan sesuai aturan.

Pelaksanaan atau implementasi program Satu Miliar Satu Desa di Desa Megamendung Kecamatan Megamendung sudah dapat dikatakan baik karena hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implelementasi

tersebut berhasil terlaksana dengan baik. Walaupun ada kendala-kendala akan tetapi berhasil diselesaikan sehingga implelementasi SAMISADE di Desa Megamendung berhasil dan dalam pelaporannya pun baik, tidak ada kendala dan masalah yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program SAMISADE sudah baik.

Kesuksesan suatu implementasi program tidak terlepas dari suatu hambatan. Adanya hambatan menjadikan suatu program tersebut harus selalu ditingkatkan lebih baik lagi. Tidak terkecuali dengan implementasi program SAMISADE di Desa Megamendung Kecamatan Megamendung yang masih ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya yaitu:

- 1) Sosialisasi yang kurang menjangkau keseluruhan masyarakat terutama masyarakat yang berada pada wilayah dilaksanakannya program SAMISADE sehingga masih banyaknya warga yang tidak tahu mengenai adanya program SAMISADE.
- 2) Banyaknya warga daerah yang menjadi daerah pelaksanaan SAMISADE yang tidak setuju jika warganya sedikit yang dikaryakan menjadi SDM dalam pembangunan dimana jalan.
- 3) Masalah SDM yang tidak dikaryakan berbuntut pada keluhan masyarakat yang berdemo kepada pihak pemerintah Desa Megamendung dimana masyarakat kurang paham mengenai SOP dalam menyampaikan keluhan yang terjadi dalam pelaksanaan program SAMISADE.
- 4) Anggaran yang didapat kurang cukup karena dalam pelaksanaannya 1 miliar tidak diterima utuh 1 miliar karena anggaran harus dipotong pajak. Oleh karena jalan yang rusak banyak dan karena dipotong pajak juga menyebabkan jarak pengecoran diperpendek.

Dalam rangka mendukung meningkatkan pelaksanaan program SAMISADE di Desa Megamendung Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor maka Pemerintah Desa Megamendung dapat melakukan beberapa upaya atau usaha yaitu diantaranya:

- 1) Sosialisasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah Desa Megamendung yaitu sosialisasi kepada Ketua RT dan RW serta memasang baliho program di tempat program dilaksanakan. Dalam program selanjutnya sosialisasi dapat dilaksanakan dengan melalui kunjungan terutama di daerah yang dilaksanakan program SAMISADE dan warga dikumpulkan, sehingga sosialisasi dari pihak pemerintah Desa Megamendung sampai langsung kepada warga dengan jelas dan rinci serta dapat memasang baliho berukuran cukup besar di titik-titik ramai dimana dalam baliho tersebut termuat informasi-informasi program SAMISADE dengan jelas dan rinci atau juga Pemerintah Desa Megamendung khusus membuat portal website untuk membahas perihal pelaksanaan SAMISADE di Desa Megamendung tiap tahunnya sehingga baik anggaran yang terpakai dan bagaimana pengimplementasiannya bisa dipaparkan kepada warga secara jelas atau bisa juga dengan membuat media sosial seperti Instagram, Facebook, Tiktok ataupun Twitter untuk memposting segala kegiatan SAMISADE sehingga bagaimanapun implementasinya dapat dilihat oleh warga khususnya warga Desa Megamendung dan dikarenakan saat ini juga hampir seluruh masyarakat memiliki media sosial sehingga pendekatan komunikasi melalui media sosial sangat diperlukan.
- 2) Kendala SDM yang dikaryakan dalam program SAMISADE dimana warga di daerah dilaksanakannya SAMISADE

cenderung tidak setuju karena SDM dari daerah lainnya lebih banyak. Sebaiknya dalam program selanjutnya diberi pengertian terlebih dahulu dan diberikan alasannya diawal program terutama dalam perencanaan. Memberikan pengertian tersebut bisa disampaikan di saat sosialisasi awal agar warga tidak ada yang salah paham mengenai SDM yang dikaryakan atau ditugaskan.

- 3) Buntut dari tidak setujunya SDM yang dikaryakan, sebagian warga yang tidak setuju demo ke Kantor Desa Megamendung. Kendala ini bisa dihindari jika SOP dari pengaduan atau keluhan diketahui oleh warga, dengan begitu baiknya di program selanjutnya sosialisasikan juga SOP jika warga ingin membuat pengaduan atau keluhan dalam program SAMISADE di Desa Megamendung.
- 4) Mengenai masalah anggaran, karena nama program tersebut Satu Miliar Satu Desa maka banyak yang beranggapan bahwa jika suatu desa berhasil mendapatkan dana bantuan maksimal 1 miliar, warga banyak yang beranggapan dana yang diterima 1 miliar juga, padahal itu belum termasuk potong pajak.

Dengan tidak cukupnya anggaran maka Desa Megamendung memotong panjang jalan dari rencana awal 1.750meter menjadi 1.350meter untuk menyesuaikan dengan anggaran. Solusi di program selanjutnya yaitu penghitungan dana yang didapat baiknya setelah dipotong pajak sehingga meminimalisir ketidakcukupan anggaran dan kesalahpahaman banyak orang mengenai anggaran serta jika pembangunan dialokasikan kepada jalan yang pada dasarnya SAMISADE memang diperuntukan utamanya untuk jalan dapat dikatakan kurang karena banyaknya jalan yang rusak dan pada dasarnya untuk membangun infrastruktur jalan biayanya memang mahal.

Dalam penelitian implementasi program SAMISADE di Desa Megamendung peneliti menemukan temuan terutama adanya Teori Tindakan Sosial dari Max Weber. Desa Megamendung sendiri merupakan desa yang sangat luas di Kecamatan Megamendung dan banyak terdapat objek wisata sehingga pembangunan infrastruktur sangat perlu untuk terus dilakukan. Program SAMISADE sangat efektif dalam membangun infrastruktur karena dana tersebut memang dikhususkan untuk infrastruktur. Dalam program SAMISADE ini diperlukan partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan ini dikarenakan SAMISADE sifatnya harus swadaya Masyarakat sehingga dibutuhkan partisipasi masyarakat dan dalam SAMISADE juga diusahakan tidak menggunakan pihak ketiga dalam pengerjaannya kecuali dalam perencanaan karena pada saat pelaksanaannya disyaratkan harus ada unsur partisipasi masyarakat. Program SAMISADE juga merupakan program untuk mengembangkan desa-desa yang ada di Kabupaten Bogor, sehingga dalam setiap pengembangan desa dibutuhkan partisipasi masyarakat karena pada dasarnya masyarakat lebih tahu apa yang dibutuhkan daerahnya untuk dikembangkan. Selain itu, masyarakat juga bisa lebih percaya pada program jika masyarakat sendiri dilibatkan dalam program.

Dalam teori Max Weber ciri-ciri pokok tindakan sosial diantaranya tindakan itu diarahkan kepada seseorang atau kepada beberapa individu, tentu dalam program SAMISADE juga diarahkan kepada individu dan beberapa individu. Berdasarkan penelitian yang sudah dilaksanakan peneliti lapangan ditemukan adanya tindakan-tindakan sosial yang sesuai dengan kajian teori dari Max Weber. Setelah menganalisa dan menelaah penelitian, bisa dipastikan bahwa teori tindakan sosial yang relevan ialah tindakan rasionalitas instrumental karena dalam program SAMISADE ini

masyarakat yang berpartisipasi tidak hanya sekedar ingin mencapai tujuan tapi masyarakat menentukan dan memikirkan rasionalnya dalam partisipasinya di program SAMISADE.

Sehingga ketika masyarakat melaksanakan tindakan sosial maka faktor rasio atau akal menjadi hal yang penting. Aktor atau pelaku dalam implementasi SAMISADE ini adalah masyarakat Desa Megamendung yang bukan hanya sekedar asal bertindak saja, akan tetapi masyarakat disini yaitu masyarakat Desa Megamendung dalam tindakan sosialnya lebih mementingkan dalam aspek rasio atau akalnya dibandingkan dengan aspek emosinya. Masyarakat Desa Megamendung tersebut telah memikirkan serta mempertimbangkan kerugian apa saja dan keuntungannya apa saja. Partisipasi masyarakat dalam program SAMISADE ini dalam pengerjaannya itu masyarakat diberi upah walau SAMISADE sifatnya swadaya masyarakat akan tetapi Masyarakat diberikan upah yang nantinya bisa untuk nafkah keluarga dan sebagainya serta dengan program SAMISADE juga infrastruktur jalan dibenahi sehingga akan memudahkan akses warga maupun wisatawan yang akan berwisata di daerah Desa Megamendung lalu masyarakat juga akan merasakan dampak ekonomi karena infrastruktur yang bagus tentu akan mempermudah akses segala bidang termasuk akan memudahkan perputaran ekonomi di Desa Megamendung.

KESIMPULAN

Penelitian ini meneliti tentang Implementasi Program Satu Miliar Satu Desa (SAMISADE) di Desa Megamendung Kecamatan Megamendung. Penelitian ini fokus pada implementasi program SAMISADE.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, berikut simpulan penelitian mengenai implementasi program SAMISADE di Desa Megamendung:

1. Implementasi program SAMISADE tahun 2023 di Desa Megamendung Kecamatan Megamendung sudah dilakukan dengan baik, hal ini didukung dengan dapat dikatakan suksesnya pelaksanaan program SAMISADE di Desa Megamendung yang pada dimana pada tahun 2023 ini dibangun jalan desa untuk melanjutkan SAMISADE di tahun 2022 lalu dan pada tahun ini sudah sukses membangun jalan sepanjang 500 meter lengkap dengan gorong-gorong serta trotoarnya.
2. Implementasi program SAMISADE di Desa Megamendung Kecamatan Megamendung tidak terlepas dari berbagai hambatan yang ada. tersebut terdapat dalam beberapa dimensi yaitu dimensi Komunikasi, dimana sosialisasi tidak menjangkau masyarakat secara keseluruhan.
3. Hambatan dalam dimensi Sumber Daya yaitu anggaran yang tidak cukup sehingga adanya perubahan rencana pada panjang jalan yang dibangun. Masih pada dimensi Sumber Daya, permasalahan warga yang tidak dikaryakan yang berujung pada permasalahan dimensi Struktur Birokrasi yaitu warga yang tidak dikaryakan melakukan demo di Kantor Desa Megamendung karena tidak pahamnya SOP mengenai pengaduan.

Upaya dalam mengatasi hambatan dalam implementasi program SAMISADE di Desa Megamendung Kecamatan Megamendung yaitu telah dilakukan sosialisasi kepada ketua RT dan RW serta pemasangan baliho program di tempat pelaksanaan program, dalam program selanjutnya dapat dilakukan dengan cara sosialisasi dilaksanakan dengan melalui kunjungan serta dapat memasang baliho berukuran cukup besar di titik-titik ramai dimana dalam baliho tersebut termuat informasi-informasi program SAMISADE dengan jelas dan rinci.

Upaya dalam masalah dimensi Sumber Daya yaitu anggaran yang tidak cukup, pemerintah Desa Megamendung sudah melakukan pemendekan pada panjang jalan yang dibangun dan di program kedepannya dapat melakukan pembuatan Rencana Anggaran Biaya yang sudah dipotong pajak. Masih pada dimensi Sumber Daya, permasalahan warga yang tidak dikaryakan untuk program selanjutnya dapat diberikan pengertian di awal yaitu pada saat sosialisasi dan untuk masalah demo, pemerintah Desa Megamendung dapat mengedukasi warga mengenai SOP pengaduan dalam sosialisasi di awal juga.

Peneliti menemukan adanya temuan partisipasi masyarakat dalam implementasi program SAMISADE di Desa Megamendung terutama dalam pengerjaan di lapangan yang sesuai dengan teori tindakan sosial menurut Max Weber.

Setelah selesai penelitian, peneliti dapat merumuskan bahwa tindakan sosial yang tepat ialah tindakan sosial rasionalitas instrumental, dimana masyarakat Desa Megamendung tidak hanya sekedar menggapai tujuan dari implementasi tersebut akan tetapi masyarakat juga memikirkan dan menentukan kerasionalan dalam ikut serta kegiatan tersebut. Lalu apabila masyarakat Desa Megamendung melakukan tindakan sosial maka rasio atau akal menjadi hal yang penting. Pada implementasi SAMISADE di Desa Megamendung masyarakat Desa Megamendung ikut serta dan bertindak tidak hanya sekedar bertindak saja, namun dalam hal ini masyarakat Desa Megamendung dalam tindakan sosialnya lebih mementingkan dalam hal akal daripada aspek emosi.

Masyarakat Desa Megamendung yang ikut serta dalam implmenetasi program SAMISADE tersebut sehingga telah mempertimbangkan kerugian dan keuntungan apa karena dalam pengerjaannya itu ada upah yang dibayar

walaupun sifatnya swadaya masyarakat dan dengan ikut sertanya masyarakat tentu akan cepat juga pengerjaannya sehingga jalan dapat cepat dipakai masyarakat luas dan akan berdampak nyata pada ekonomi karena infrastruktur yang bagus tentu akan mempermudah akses segala bidang termasuk akan memudahkan perputaran ekonomi di Desa Megamendung.

SARAN

Jika melihat kesimpulan yang diperoleh peneliti dalam penelitian program SAMISADE di Desa Megamendung ini, maka peneliti merekomendasikan beberapa hal yang mungkin dapat digunakan untuk meningkatkan keberhasilan pada implementasi program Satu Miliar Satu Desa (SAMISADE) di Desa Megamendung.

Berikut beberapa rekomendasi dalam upaya peningkatan keberhasilan implementasi program SAMISADE di Desa Megamendung Kecamatan Megamendung:

1. Perlu adanya peningkatan dalam segi sosialisasi karena di lapangan terdapat warga yang tidak tahu mengenai adanya program SAMISADE, upaya yang dapat dilakukan sosialisasi langsung dari pemerintah Desa Megamendung kepada masyarakat terutama yang berada pada lokasi pelaksanaan SAMISADE atau dengan baliho-baliho berukuran besar yang memuat rincian kegiatan SAMISADE sehingga sosialisasi program dapat ditingkatkan.
2. Penulis berharap agar masalah warga yang dikaryakan dapat dimusyawarahkan terlebih dahulu di awal dan masyarakat diberikan pengertian mengenai kebijakan pemerintah Desa Megamendung mengenai warga yang dikaryakan dan musyawarah tersebut dapat dilakukan di sosialisasi awal kepada masyarakat sehingga masalah

ketidaksetujuan dalam warga yang dikaryakan dapat dihindari atau diminimalisir.

3. Perlu disampaikannya juga SOP atau tata cara melakukan pengaduan jika ada keluhan kepada masyarakat sehingga hal-hal yang dapat mengganggu jalannya program seperti demo warga dapat dihindari atau diminimalisir.
4. Dalam anggaran, penulis menyarankan untuk penghitungan dana yang didapat baiknya setelah dipotong pajak sehingga meminimalisir kekurangan anggaran pada saat pelaksanaan dan meminimalisir kesalahpahaman banyak orang mengenai anggaran serta jika pembangunan dialokasikan kepada jalan yang pada dasarnya SAMISADE memang diperuntukan utamanya untuk jalan dapat dikatakan kurang karena banyaknya jalan yang rusak dan mahal biaya membangun infrastruktur jalan.
5. Disarankan dalam penelitian lanjutan mengenai program SAMISADE ini yaitu penelitian mengenai analisis dampak program SAMISADE..

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2008. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara, Edisi Kedua*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Afifah, N., Rahmawati, R., & Purnamasari I. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Bogor. *ADMINISTRATIE Jurnal Administrasi Publik*, 2(1), 1-8.
- Agustino, L. 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Dye, Thomas R. 2011. *Understanding Public Policy*, New Jersey: Prentice Hall.
- Edward III, George C (edited). 1990. *Public Policy Implementing*, Jai

- Press Inc, London-England.
Goggin, Malcolm L et al.
- Kanaha, I. (2019). Implementasi Program Pembangunan Desa: Studi Kasus Desa Tolonuo Selatan Selatan, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara. *Journal of Public Administration and Local Governance*, 3(2), 94-104.
- Khothimah, K., & Hertati, D. (2021). Evaluasi kebijakan program bantuan sosial tunai. *Jurnal Governansi*, 99-110.
- Mazmanian, D. A & Sabatier, P. A. 1983. *Implementation and Public Policy*. USA: Scott Foresman and Company.
- Mudrajat Kuncoro. 2003. *Ekonomi Pembangunan Teori, Masalah dan Kebijakan*, Yogyakarta: AMP YKPN.
- Purwanto Agus Erwan, Ph. D dan Dyah Ratih Sulistyastuti, M.S. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik*, Yogyakarta: GAVA MEDIA.
- Ramadhan, D. P., & Paujjah, E. (2021). Pemberdayaan Desa melalui Peningkatan Infrastruktur di Kabupaten Bogor. *PROCEEDINGS UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG*, 1(36), 64-70.
- Salsabila, M. S., & Fauzi, A. M. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi Kasus Desa Menang Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri). *Jurnal Pariwisata Terapan*, 5(1), 38-49.
- Saprudin, S. S., Suyatna, U., Shafrullah, F., & Indrawati, L. (2022). *Community Empowerment Through Village Owned Business Entities and Corporate Social Responsibility In Rural Clean Water Supply Program In Bogor District*. *Journal of Positive School Psychology*, 6(10), 2482-2492.
- Sondang P. Siagian MPA. 2004. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung.
- Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: alfabet.
- Sugiyono, 2019. *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: alfabeta.
- Tarigan, R. B. (2018). *Implementasi Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Munte Kecamatan Munte Kabupaten Karo*.
- Tayibnapi, Farida Yusuf. 2008. *Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Pemerintah Kabupaten Bogor. 2020. *Peraturan Bupati Bogor No. 83 Tahun 2020 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa*. Bogor.
- Pemerintah Kabupaten Bogor. 2021. *Peraturan Bupati Bogor No. 100 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 83 Tahun 2020 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa*. Bogor.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus: Edisi dan Revisi Terbaru*. Yogyakarta: Center for Academic Publishing Service.